

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan nasional serta mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak demi menggali seluruh potensi pendapatan negara. Apabila pendanaan tidak mencukupi, maka operasional negara akan terhenti secara otomatis. Namun, kebijakan pajak dari pemerintah tidak selalu mendapat tanggapan positif dari perusahaan atau lembaga. Perbedaan kepentingan antara sektor bisnis dan pemerintah membuat pemerintah perlu lebih tegas dalam mengumpulkan dana dari masyarakat agar tujuan negara dalam mencapai kesejahteraan umum dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Namun, di sisi lain, pajak dianggap sebagai beban oleh perusahaan karena mengurangi laba bersih, sehingga banyak perusahaan yang berusaha untuk mengurangi kewajiban pajaknya.

Terbukanya perekonomian suatu negara dapat menciptakan peluang yang sangat besar bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui inovasi dan berbagai kreasi. Pada dasarnya, bisnis yang berorientasi pada

keuntungan akan mempunyai insentif untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi biaya-biaya lainnya. Perencanaan manajemen memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini, dan salah satu biaya yang coba dikurangi oleh perusahaan adalah beban pajak. Ada hubungan erat antara pajak dengan keuntungan dan biaya (Wang, 2015). Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dihadapkan pada mempertimbangkan kedua hal tersebut.

Sebagai wajib pajak, perusahaan diwajibkan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besaran pajak dihitung berdasarkan laba bersih sebelum pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai salah satu biaya yang harus ditanggung. Pembayaran pajak penghasilan kepada pemerintah adalah kewajiban perusahaan, sebagai bentuk alokasi aset yang diberikan oleh pemilik atau pihak perusahaan kepada pemerintah. Dalam konteks tersebut, keputusan terkait pajak mencerminkan karakteristik perusahaan serta perilaku manajemen.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kebijakan ESG memengaruhi pengambilan keputusan serta kinerja perusahaan (Short et al., 2016). Berdasarkan temuan ini, ESG dapat berpengaruh terhadap upaya pengurangan pajak oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena dampak operasional perusahaan terhadap berbagai aspek seperti kesehatan, budaya, perekonomian, dan kehidupan sosial. Selain itu, terdapat respon serius dari masyarakat, termasuk pihak-pihak berkepentingan, investor publik, dan

kelompok konsumen, khususnya pada perusahaan multinasional (MNC), yang menuntut adanya pengendalian dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka (Banarjee, 2010). Tanggung jawab sosial perusahaan (ESG) menggambarkan sejauh mana perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korporasi sering kali dianggap sebagai agen perubahan sosial yang tidak efektif dan kurang tepat dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, terutama dalam kaitannya dengan upaya memaksimalkan nilai pemegang saham.

Tindakan perusahaan dalam menurunkan kewajiban pajak yang wajib disetor dapat dilihat dari seberapa agresif manajemen saat menurunkan beban pajak yakni dikenal dengan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan segala upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak penghasilan kepada negara. (Wijaya & Sutandi, 2022) juga mengemukakan bahwa upaya pengurangan pembayaran pajak dalam agresivitas pajak diklasifikasikan kedalam perencanaan pajak cara legal (*tax avoidance*) dan cara ilegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tidak selalu mengarah kepada ketidakpatuhan perpajakan apabila dilakukan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Salah satu contoh kasus agresivitas pajak di Indonesia terjadi pada perusahaan di sektor barang konsumen primer. Fenomena ini sering terjadi, seperti yang dialami oleh PT Coca Cola Indonesia, yang melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Investigasi yang dilakukan oleh.

Praktik tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menemukan adanya pembengkakan beban biaya iklan yang sangat mencurigakan dan tidak wajar pada tahun 2002-2006. Pembengkakan tersebut menurut Direktorat Jenderal Pajak mengarah praktik ke Tax Avoidance. Menurut Direktorat Jenderal Pajak total Penghasilan kena pajak PT Coca Cola seharusnya sebesar 603,48 miliar, sedangkan perhitungan dari PT Coca Cola penghasilan kena pajak hanya berjumlah 402,59 miliar sehingga Direktorat Jenderal Pajak menghitung kekurangannya pajak. Tindakan ini menunjukkan bahwa tujuan perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab perpajakan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan serta kepedulian terhadap lingkungan sosial (Donny Indradi, Indra Iman Sumantri 2020).

Pengungkapan ESG tentu saja menyebabkan biaya tambahan bagi perusahaan, karena mereka harus menyediakan dana untuk memenuhi kewajibannya. Perlakuan terhadap biaya yang dikeluarkan perusahaan juga akan memengaruhi jumlah penghasilan kena pajak yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan. Akibatnya, perusahaan mulai mencari cara untuk mengurangi beban pajak melalui tindakan agresivitas pajak guna menghindari kedua biaya tersebut. Perilaku ini jelas bertentangan dengan norma masyarakat. Akibatnya, untuk menyembunyikan tindakan ini serta mengubah persepsi publik dan memperoleh legitimasi, perusahaan berusaha memenuhi tanggung jawab sosialnya secara lebih luas. Keputusan pimpinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak ini tidak terjadi secara kebetulan.

Sejalan dengan pengungkapan ESG dalam laporan tahunan, manajer mungkin memiliki alasan tertentu untuk mengungkapkan ESG. Pengungkapan ESG dalam laporan tahunan bisa menjadi salah satu strategi bagi manajemen untuk menghindari kewajiban pajak (Tiarawati, 2015). Semakin banyak perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial, semakin positif pula opini publik terhadap perusahaan tersebut. Namun, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara agresivitas pajak perusahaan dan ESG dapat bervariasi.

Mustika (2017) menemukan bahwa agresivitas pajak perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap ESG. Sebaliknya, penelitian oleh Setyoningrum dan Zulaikha (2019) menunjukkan bahwa agresivitas pajak perusahaan berpengaruh negatif terhadap ESG. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor pertama yaitu *Environmental Social Governance* (ESG). *Environmental Social Governance* (ESG) merupakan suatu program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan kepada stakeholder dan pihak – pihak lain yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Perusahaan yang melakukan kegiatan ESG akan mendapatkan legitimasi serta hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingannya dapat terjalin. Disisi lain perusahaan melalui pelaksanaan ESG dapat memanfaatkan biaya ESG sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Pengungkapan kegiatan ESG perusahaan dapat menunjukkan tingkat agresivitas pajak perusahaan karena semakin tinggi pelaksanaan *Environmental Social Governance* mengakibatkan semakin

agresif perusahaan untuk menurunkan pajaknya melalui biaya ESG. Oleh karena itu, perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab yakni yang terlibat *tax avoidance*.

Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh faktor lain yaitu leverage. Leverage adalah rasio yang mengukur besarnya penggunaan utang dalam perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan pembiayaannya dari utang untuk berbagai keperluan perusahaan baik keperluan internal maupun keperluan eksternal. Perusahaan dengan leverage tinggi menunjukkan semakin banyak perusahaan dibiayai oleh utang daripada modalnya sendiri. Perusahaan yang menggunakan pembiayaan dari utang harus memenuhi beban pinjaman seperti beban bunga, angsuran maupun biaya lainnya yang timbul atas utang. Salah satu beban pinjaman yang dibayarkan dari pendapatan perusahaan dan mempengaruhi jumlah pajak terutang adalah beban bunga. Beban bunga mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan mengakibatkan semakin rendah beban pajak yang dibayarkan. Perbandingan ini menginterpretasikan banyaknya biaya guna pengelolaan aset dari kewajiban dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan ulasan tersebut, semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, semakin besar pula agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Profitabilitas juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Profitabilitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dapat memperoleh laba dalam periode tertentu. Semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin tinggi pula rasio

profitabilitasnya. Perusahaan akan membayar beban pajak yang tinggi apabila laba perusahaan tinggi sebaliknya saat laba perusahaan rendah beban pajak yang harus ditanggung juga rendah. Profitabilitas di definisikan sebagai deskripsi kinerja suatu perusahaan yang menerima keuntungan oleh proses aset dengan sebutan *Return on Assets* (ROA) yang menggambarkan kinerja keuangan. Hal ini karena tingginya nilai ROA menggambarkan bahwa kinerja dalam menghasilkan keuntungan akan meningkat serta tindakan penghindaran pajak akan menurun.

Ukuran perusahaan adalah faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak. Ukuran perusahaan mencerminkan skala besar atau kecilnya perusahaan dan dapat diukur dengan total aset atau harta yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan aset besar biasanya dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berkurang kemungkinannya untuk terlibat dalam agresivitas pajak. Selain itu, perusahaan besar sering kali mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat, yang mengurangi insentif mereka untuk mengurangi beban pajak secara agresif. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah potensi terjadinya agresivitas pajak.

Adanya *research gap* pada beberapa temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak studi telah mengeksplorasi pengaruh Environmental Sosial Governance (ESG), ukuran perusahaan, leverage, dan *Return On Assets* terhadap agresivitas pajak. Penelitian oleh Jessica dan Toly (2014) menemukan bahwa pengungkapan ESG, ukuran perusahaan, dan

Return On Assets tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara leverage menunjukkan pengaruh yang signifikan. Leverage mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan utangnya dalam pembiayaannya. Kuriah dan Asyik (2016) juga mengungkapkan bahwa tingginya nilai leverage perusahaan cenderung membuat perusahaan tersebut lebih agresif dalam mengelola pajaknya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara pengungkapan bahwa leverage dan *Environmental Social Governance* tidak memengaruhi penghindaran pajak, sementara ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Wijayanti et al., 2016). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Environmental Social Governance* terhadap agresivitas pajak, mengkaji pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, mengevaluasi pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak, serta menilai pengaruh *Return on Assets* terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan apakah *Environmental Social Governance*, ukuran perusahaan, leverage, dan *Return on Assets* secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Adanya *Tax Planning* dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan ketentuan mengenai pengecualian serta pemotongan atau pengurangan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan. Penerapan *Tax Planning* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya – biaya yang merupakan deductible expenses, tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal. Tujuan *Tax Planning* bukanlah untuk menghindari kewajiban pajak, melainkan untuk merancang atau mengatur agar jumlah pajak yang dibayar tidak melebihi yang seharusnya.

Penelitian mengenai agresivitas pajak dilakukan karena bagi perusahaan, pajak bukanlah sumber pendapatan tetapi merupakan beban yang harus dibayar. Pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga perusahaan akan mencari cara untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Banyak perusahaan berusaha meminimalkan biaya pajak yang harus dibayar karena mereka melihat pajak sebagai faktor pengurang laba bersih. Oleh karena itu, tidak jarang perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan. Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah dengan melakukan agresivitas pajak. Meskipun perusahaan tetap memenuhi kewajiban membayar pajak, mereka menggunakan strategi agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak, yang pada akhirnya dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.

Adanya banyak perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang pengaruh 4 independen yang meliputi *Environmental Social Governance*, *Leverage*, Profitabilitas serta berukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Pengaruh

Environmental Social Governance, Leverage, Profitabilitas serta berukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022)”).

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut: perusahaan melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) melalui agresivitas pajak. Tingginya pajak terutang yang harus dibayar mendorong perusahaan untuk berusaha meminimalkan beban pajak. Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena penerimaan pajak negara semakin menurun. Selain itu, terdapat banyak perusahaan besar yang masih terlibat dalam penghindaran pajak.

Berbagai faktor internal dan eksternal memengaruhi agresivitas pajak, yang dapat menyebabkan fluktuasi dalam tingkat agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat peminjaman tinggi akan menghadapi beban bunga yang signifikan, yang pada gilirannya akan mengurangi laba. Penurunan laba ini berakibat pada pengurangan beban pajak pada periode tertentu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan

pertanyaan -pertanyaan atas penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Environmental Social Governance* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2022?
2. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022?
5. Apakah *Environmental Social Governance*, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Environmental Social Governance* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.

1.5 Kontribusi

1. Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakan melalui gambaran pengaruh *Environmental Social Governance*, leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
2. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas dan menambah wawasan penulis di bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh *Environmental Social Governance*, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bermanfaat untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan pengembangan suatu teori, menambah wawasan, dan dapat dijadikan sumber acuan untuk

penelitian di bidang Accounting yang terkait laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Bertujuan untuk memuaskan bahasan didalam penelitian ini maka penulis mencantumkan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari landasan teori yang memberikan penjelasan tentang teori teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini seperti teori utama, teori pendukung, penelitian sebelumnya, kerangka pikiran dan rumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan variabel dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini ialah bagian akhir dari penelitian yang menyajikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta memuat saran – saran yang ditunjukkan kepada peneliti sebelumnya yang ingin melanjutkan atau

mengembangkan penelitian yang telah dilaksanakan.